

PRINSIP DISTRIBUSI DALAM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM EKONOMI MODERN: KAJIAN LITERATUR

Habibis Salam¹, Mohd Winario², Muhammad Zakir³

^{1,2,3} Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: habibjr.ceng@gmail.com

ABSTRACT

Distribution is one of the fundamental aspects of an economic system that plays an important role in creating justice and social welfare. From the Islamic perspective, wealth distribution is not merely viewed as an economic activity, but also as part of moral and social responsibility based on the values of justice, balance, and public benefit (maslahah). The principles of distribution in Islam emphasize the prohibition of wealth concentration among certain groups, the obligation to share wealth through social instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf, as well as the requirement to conduct economic activities ethically. This article aims to examine the principles of distribution in Islam and analyze their implementation in the context of the modern economy. The method used is a literature review of relevant scientific sources, including journals, books, and academic publications. The results of the study indicate that Islamic distribution principles have strong relevance to modern economic challenges, particularly in addressing income inequality and improving social welfare. The implementation of Islamic distribution values in modern economic systems can serve as an alternative solution to creating a more just, inclusive, and sustainable economy.

Keywords: *Distribution Principles, Islamic Economics, Social Justice, Modern Economy*

ABSTRAK

Distribusi merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem ekonomi yang berperan penting dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, distribusi kekayaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip distribusi dalam Islam menekankan larangan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, kewajiban berbagi melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta keharusan menjalankan aktivitas ekonomi secara etis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip distribusi dalam Islam serta menganalisis implementasinya dalam konteks ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terhadap berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, dan publikasi akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip distribusi dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan tantangan ekonomi modern, khususnya dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Implementasi nilai-nilai distribusi Islam dalam sistem ekonomi modern dapat menjadi alternatif solusi untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Prinsip Distribusi, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, Ekonomi Modern

PENDAHULUAN

Distribusi merupakan salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi karena berkaitan langsung dengan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin meningkat menjadi persoalan global yang dihadapi banyak negara, termasuk negara-negara berkembang. Sistem ekonomi modern yang berorientasi pada pertumbuhan sering kali belum mampu menjamin distribusi kekayaan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat (Piketty, 2020).

Dalam perspektif Islam, distribusi kekayaan tidak hanya dipahami sebagai proses ekonomi semata, tetapi juga sebagai amanah dan tanggung jawab sosial. Islam menekankan bahwa harta pada hakikatnya adalah titipan Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara adil dan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu saja. Prinsip ini menegaskan dimensi moral dan spiritual dalam aktivitas distribusi ekonomi (Chapra, 2021).

Prinsip distribusi dalam Islam berlandaskan nilai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Nilai-nilai tersebut bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dengan demikian, distribusi dalam Islam tidak hanya menghindari ketimpangan ekonomi, tetapi juga mendorong terciptanya solidaritas sosial dalam masyarakat (Hasan & Ali, 2022).

Salah satu karakteristik utama distribusi dalam Islam adalah adanya instrumen ekonomi sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi instrumen tersebut mampu berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Sarea & Haneef, 2020).

Di sisi lain, sistem ekonomi modern menghadapi tantangan serius berupa konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, meningkatnya kesenjangan sosial, serta melemahnya fungsi solidaritas sosial. Kondisi ini menimbulkan kritik terhadap sistem distribusi konvensional yang dinilai kurang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Stiglitz, 2021).

Perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan liberalisasi pasar dan digitalisasi ekonomi turut memengaruhi pola distribusi kekayaan. Tanpa regulasi yang berkeadilan, perkembangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan distribusi (UNDP, 2022).

Ekonomi Islam hadir sebagai salah satu alternatif sistem ekonomi yang menawarkan konsep distribusi berbasis nilai etika dan keadilan sosial. Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam tidak menafikan kepemilikan individu, tetapi mengaturnya agar selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai moral (Ascarya, 2023).

Beberapa studi menunjukkan bahwa prinsip distribusi Islam memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Distribusi kekayaan yang adil diyakini mampu meningkatkan inklusi sosial, memperkuat stabilitas ekonomi, serta mengurangi potensi konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi (Huda et al., 2021).

Implementasi prinsip distribusi Islam dalam ekonomi modern dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial, pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional, serta integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan dan ekonomi nasional. Dengan pendekatan ini, prinsip distribusi Islam

tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam konteks kekinian (Beik & Arsyianti, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai prinsip distribusi dalam Islam dan implementasinya dalam ekonomi modern menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai relevansi nilai-nilai distribusi Islam sebagai solusi alternatif dalam menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi global serta mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

LITERATUR REVIEW

Konsep Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, distribusi tidak dipahami semata-mata sebagai proses penyaluran barang dan kekayaan dari produsen kepada konsumen, tetapi sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Distribusi dalam perspektif Islam harus mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Oleh karena itu, distribusi kekayaan tidak boleh menyebabkan penumpukan harta pada kelompok tertentu, melainkan harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Chapra, 2021).

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung membiarkan mekanisme pasar bekerja secara bebas, Islam memberikan rambu-rambu normatif dalam proses distribusi. Islam menolak praktik distribusi yang menimbulkan ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang melarang agar harta "tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja". Dengan demikian, distribusi dalam Islam berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan ekonomi yang muncul akibat mekanisme pasar yang tidak terkendali (Hassan & Ali, 2022).

Selain itu, distribusi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hasil produksi, tetapi juga menyangkut akses terhadap sumber daya ekonomi. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kesempatan ekonomi yang adil sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan distribusi tidak selalu berarti kesamaan hasil, melainkan kesetaraan kesempatan dan perlindungan terhadap kelompok lemah dalam masyarakat (Huda et al., 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan juga memiliki dimensi spiritual. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang penggunaannya akan dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun moral. Oleh karena itu, aktivitas distribusi tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pandangan ini membedakan distribusi Islam dari konsep distribusi sekuler yang bersifat materialistik (Ascarya, 2023).

Landasan Nilai Syariah dalam Proses Distribusi

Proses distribusi dalam ekonomi Islam berlandaskan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan solidaritas. Distribusi bukan sekadar mekanisme ekonomi, tetapi merupakan bagian dari muamalah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Setiap bentuk distribusi kekayaan harus memperhatikan hak-hak pihak lain dan tidak menimbulkan kezaliman dalam bentuk eksploitasi atau marginalisasi kelompok tertentu (Beik & Arsyianti, 2022).

Nilai keadilan menjadi fondasi utama dalam distribusi Islam. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan, tetapi juga sebagai penempatan hak dan kewajiban secara proporsional. Islam menolak praktik distribusi yang menciptakan

kesenjangan ekstrem antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, distribusi dalam Islam diarahkan untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya ketimpangan struktural dalam masyarakat (Chapra, 2021).

Selain keadilan, nilai tanggung jawab sosial (social responsibility) sangat ditekankan dalam proses distribusi. Individu yang memiliki kelebihan harta tidak dipandang sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai pengelola yang memiliki kewajiban sosial terhadap masyarakat. Prinsip ini mendorong terciptanya kesadaran kolektif bahwa kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan negara (Hassan & Ali, 2022).

Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam

Islam menyediakan berbagai instrumen distribusi yang bersifat wajib dan sukarela, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Zakat, misalnya, merupakan kewajiban yang secara langsung bertujuan mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Sarea & Haneef, 2020).

Wakaf juga menjadi instrumen distribusi yang memiliki dampak jangka panjang. Melalui wakaf produktif, aset ekonomi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Studi menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf mampu memperkuat ekonomi umat dan mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa menghilangkan nilai kepemilikan individu (Beik & Arsyianti, 2022).

Dalam konteks ekonomi modern, instrumen distribusi Islam mengalami perkembangan melalui integrasi dengan sistem keuangan dan kebijakan publik. Digitalisasi zakat dan wakaf, misalnya, meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi, sehingga memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip distribusi Islam bersifat adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman (As-carya, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konsep, teori, dan pemikiran yang berkembang dalam berbagai literatur ilmiah, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber pustaka yang relevan, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, prosiding seminar, artikel ilmiah, regulasi terkait, serta laporan lembaga resmi yang membahas distribusi ekonomi Islam dan implementasinya dalam sistem ekonomi kontemporer. Literatur yang digunakan diprioritaskan dari publikasi lima tahun terakhir guna memastikan aktualitas dan relevansi informasi yang dianalisis, meskipun beberapa referensi klasik tetap digunakan sebagai landasan teoritis dalam memahami konsep distribusi menurut perspektif Islam.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber literatur, seleksi berdasarkan kesesuaian tema penelitian, klasifikasi data sesuai fokus kajian, serta telaah kritis terhadap isi literatur yang terpilih. Setiap sumber dianalisis untuk menemukan gagasan utama, persamaan, perbedaan, serta

perkembangan pemikiran terkait prinsip distribusi Islam, seperti keadilan, pemerataan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan berbagai konsep dan teori distribusi Islam yang ditemukan dalam literatur. Selanjutnya, pada tahap analitis dilakukan sintesis terhadap berbagai temuan untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta relevansi penerapan prinsip distribusi Islam dalam konteks ekonomi modern. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi sistem distribusi Islam dalam mewujudkan keadilan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Distribusi Islam dalam Ekonomi Modern

Implementasi prinsip distribusi Islam dalam ekonomi modern memerlukan integrasi antara nilai-nilai syariah dengan instrumen ekonomi kontemporer yang berkembang dalam sistem global. Dalam perspektif Islam, distribusi bukan sekadar proses penyaluran barang dan jasa, melainkan mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, distribusi menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu, tetapi dapat dinikmati secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat (Chapra, 2021).

Dalam ekonomi modern, ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan masih menjadi permasalahan global yang serius. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperbesar angka kemiskinan, serta meningkatkan kerentanan sosial masyarakat (UNDP, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak selalu diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan. Oleh sebab itu, prinsip distribusi Islam menawarkan alternatif solusi yang menempatkan keadilan distributif sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi.

Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mengimplementasikan prinsip distribusi Islam melalui kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam, pemerintah bertindak sebagai regulator sekaligus fasilitator yang bertanggung jawab memastikan terciptanya distribusi kekayaan yang adil. Bentuk implementasinya dapat berupa kebijakan fiskal progresif, subsidi bagi kelompok rentan, pengembangan program perlindungan sosial, serta penguatan sistem pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata bagi seluruh warga negara (Kahf, 2020).

Zakat merupakan instrumen distribusi yang paling fundamental dalam ekonomi Islam. Sebagai kewajiban keagamaan, zakat memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang sangat signifikan. Dana zakat yang dikumpulkan dari kelompok masyarakat mampu kemudian disalurkan kepada kelompok mustahik yang membutuhkan sehingga terjadi redistribusi pendapatan secara langsung. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional mampu menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan (Huda et al., 2021). Di Indonesia, peran lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai lembaga amil zakat menjadi contoh konkret implementasi prinsip distribusi Islam dalam sistem ekonomi modern.

Selain zakat, wakaf produktif juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan distribusi kesejahteraan yang berkelanjutan. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif maupun produktif dalam jangka pendek, wakaf memiliki karakteristik jangka panjang karena aset pokoknya tetap dipertahankan sementara manfaat ekonominya terus didistribusikan kepada masyarakat. Pengembangan wakaf produktif dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan usaha mikro dapat menciptakan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat luas (Ascarya & Yumanita, 2022). Dalam konteks ekonomi modern, digitalisasi pengelolaan wakaf juga membuka peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Perkembangan teknologi digital turut memberikan peluang baru bagi implementasi prinsip distribusi Islam. Kehadiran platform digital zakat, wakaf online, crowdfunding syariah, dan financial technology (fintech) syariah memungkinkan penghimpunan serta penyaluran dana sosial Islam dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital ini memperluas jangkauan distribusi hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat fungsi distribusi dalam ekonomi Islam sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sosial keagamaan (Ahmed, 2021).

Dalam sistem ekonomi modern yang ditandai oleh globalisasi, prinsip distribusi Islam juga menawarkan pendekatan etis yang mampu menyeimbangkan orientasi keuntungan dengan tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi kapitalis sering kali dikritik karena mendorong akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu sehingga memperlebar kesenjangan sosial. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan bahwa kepemilikan harta memiliki dimensi sosial yang mengandung hak orang lain di dalamnya. Konsep ini mendorong individu maupun korporasi untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai instrumen distribusi yang telah ditetapkan syariah (Chapra, 2021).

Joseph Stiglitz (2021) menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi efisiensi pasar, menurunkan mobilitas sosial, dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip distribusi Islam yang menolak konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai distribusi Islam ke dalam kebijakan ekonomi modern dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dampak Prinsip Distribusi Islam terhadap Kesejahteraan dan Keberlanjutan Ekonomi

Penerapan prinsip distribusi Islam memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Distribusi kekayaan yang lebih merata memungkinkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah memperoleh akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, kualitas hidup meningkat dan produktivitas ekonomi masyarakat pun menjadi lebih baik. Dengan demikian, distribusi yang adil tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemerataan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan manusia yang berkelanjutan (Huda et al., 2021).

Dari perspektif ekonomi makro, distribusi pendapatan yang lebih merata mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli akan mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang me-

madai, aktivitas produksi dan investasi juga meningkat sehingga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, distribusi yang adil dapat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2021).

Prinsip distribusi Islam juga berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kelompok masyarakat miskin memperoleh dukungan ekonomi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengembangkan usaha produktif. Program zakat produktif yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial. Dalam jangka panjang, penerima manfaat bahkan dapat bertransformasi menjadi muzakki yang turut berkontribusi dalam sistem distribusi ekonomi Islam (Beik & Arsyianti, 2021).

Selain meningkatkan kesejahteraan ekonomi, distribusi Islam juga memiliki dampak sosial yang sangat penting. Ketimpangan ekonomi yang tinggi sering kali menjadi pemicu konflik sosial, kriminalitas, dan ketidakstabilan politik. Dengan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, potensi terjadinya konflik akibat kecemburuan sosial dapat diminimalkan. Masyarakat yang merasakan keadilan ekonomi cenderung memiliki tingkat kepercayaan sosial yang lebih tinggi dan hubungan sosial yang lebih harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi Islam berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial sekaligus ekonomi (Chapra, 2021).

Dalam konteks keberlanjutan ekonomi, prinsip distribusi Islam mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Sistem ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan tanpa memperhatikan distribusi sering kali menghasilkan ketimpangan yang pada akhirnya mengancam stabilitas ekonomi itu sendiri. Sebaliknya, distribusi yang adil menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat karena manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip distribusi Islam tidak hanya relevan sebagai norma keagamaan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun sistem ekonomi modern yang berkeadilan, inklusif, resilien, dan berkelanjutan (UNDP, 2022; Stiglitz, 2021).

SIMPULAN

Prinsip distribusi dalam Islam menempatkan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama dalam pengelolaan dan penyaluran kekayaan. Distribusi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai mekanisme moral dan spiritual yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bersama serta mencegah terjadinya ketimpangan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki pendekatan yang holistik dalam mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa instrumen distribusi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif, terutama dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Ketika dikelola secara profesional dan transparan, instrumen distribusi Islam mampu berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks ekonomi modern, prinsip distribusi Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Integrasi nilai-nilai syariah dengan sistem ekonomi kontemporer, termasuk melalui digitalisasi dan kebijakan publik yang inklusif, memperkuat efektivitas distribusi kekayaan. Dengan demikian, prinsip distribusi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tan-

tangan ketimpangan ekonomi global. Secara keseluruhan, penerapan prinsip distribusi dalam Islam berpotensi menjadi alternatif solusi bagi permasalahan ketidakadilan ekonomi dalam sistem modern. Pendekatan distribusi yang berlandaskan nilai syariah mampu mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Ahmed, H. (2021). *Islamic Social Finance*. Palgrave Macmillan.
- Ascarya. (2023). *Ekonomi Islam: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2022). *Wakaf Produktif dan Pembangunan Ekonomi Umat*. Bank Indonesia.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2022). Zakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 101–115.
- Chapra, M. U. (2021). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Chapra, M. U. (2021). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Hassan, M. K., & Ali, M. (2022). Islamic economic principles and social justice: Evidence from Muslim countries. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 18(1), 1–18.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2021). Peran ekonomi Islam dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 1–18.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Kencana.
- Kahf, M. (2020). *The Role of Government in Islamic Economy*. IRTI-IDB.
- Piketty, T. (2020). *Capital and ideology*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sarea, A. M., & Haneef, M. A. (2020). The role of zakat in poverty alleviation: Evidence from Muslim countries. *International Journal of Zakat*, 5(2), 1–14.
- Stiglitz, J. E. (2021). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. New York: W. W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.
- UNDP. (2022). *Human development report 2022: Uncertain times, unsettled lives*. New York: United Nations Development Programme.